

BAB II

SANKSI UNI EROPA TERHADAP MYANMAR

Myanmar adalah sebuah negara yang saat ini masih dikuasai rezim militer yang otoriter. Setiap gerakan demokrasi yang muncul sudah pasti mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Secara sistematis rezim militer mampu melemahkan berbagai gerakan oposisi yang muncul dari masyarakat sipil.²⁵

Secara geografis Myanmar memiliki luas wilayah sebesar ±677.000 km², wilayah ini terbentang sepanjang 936 dari Barat ke Timur dan 2.051 km dari Utara ke Selatan²⁶ dengan garis perbatasan sepanjang 6.000 km diantara lima Negara yaitu India, Cina, Bangladesh, Thailand, dan Laos. Daerah perbatasannya memiliki hambatan alam berupa daerah pegunungan yang membentang ke Barat Daya, Utara, dan Timur, serta sungai di bagian Barat dan Tenggara²⁷. Di Myanmar sendiri selain terdapat etnis mayoritas Burma yang jumlahnya ±65% dari keseluruhan jumlah penduduk Myanmar, terdapat pula sejumlah etnis minoritas seperti Chin, Kachin, Karen, Karenni, Rakhin, dan Shan.²⁸

Myanmar (waktu itu bernama Burma) merdeka Dari Inggris tepatnya pada tanggal 4 Januari 1948, atas sebuah kesepakatan damai antara pemerintahan colonial

²⁵ M. Adian Firmas, "Prospek Demokrasi di Myanmar", Jurnal Universitas Paramadina. Vol 2 no 2. Januari 2003 hal 128

²⁶ Alexandra Retno Wulan, "Tinjauan Perkembangan dan Global Isu Myanmar, Semenanjung Korea dan Konflik Darfur", Analisis CSIS. Vol.36. No.4, Desember 2007, Hal.37

²⁷ John Fuston, *Government and Politics in Southeast Asia*, (Singapura, 2001) Hal.128

²⁸ Anais Tamen, "European Sanction Related to Human Rights: The Case of

Burma/Myanmar" dissertation dilautin dari [http://www.ihlgio.org/ohl/docs/memoire AT htm](http://www.ihlgio.org/ohl/docs/memoire_AT.htm) diakses

Inggris dan kaum nasionalis Burma yang dipimpin oleh Thakin Nu. Penerus dari Jenderal Aung San yang tewas terbunuh. Jenderal Aung San yang merupakan tokoh Nasionalis Burma tersebut adalah ayah dari Daw Aung San Suu Kyi (pemimpin partai NLD).²⁹

Pada saat itu, Myanmar berada dibawah pemerintahan sipil perdana Menteri U Nu, ia mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan system parlementer, sebagaimana halnya Negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosio politik yang rumit. Dengan strategi pembangunan, "Pydawtha" (Negara yang makmur). U Nu berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan dalam negerinya.³⁰ Namun strategi penerapan Pydawitha tersebut pada akhirnya mengalami kegagalan karena perencanaan tersebut terlalu menekankan pada industrialisasi atas biaya dari pengembangan sector pertanian, karena efisiensi anggaran pada sector public. Menurunnya harga beras pada pasar internasional dan naiknya harga beras pada tingkat konsumen dalam negeri, serta terjadinya korupsi pada jajaran pemerintahan Myanmar memicu timbulnya perang saudara dan pemberontakan etnis yang member dampak pada kemacetan dan inflasi perekonomian pada tahun 1950-an.³¹

²⁹ Maeda yoppy, Gerakan Demokrasi Myanmar & Kegagalan Menjatuhkan Junta Militer dikutip dari <http://maeda-yoppy.blogspot.com/2007/10/gerakan-demokrasi-myanmar-kegagalan.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2013

³⁰ David I Steinberg, Burma A Socialist Nation of Southeast Asia, (Colorado, Westview Press 1982) Hal 45.

³¹ Ditinjau dari Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia, Kerjasama ASEAN Dalam

A. NAIKNYA JUNTA MILITER

Keterlibatan militer dimulai ketika Jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikan ketertiban dan mempersiapkan pemilu pada tahun 1960. Pemerintahan militer pada saat itu berhasil memulihkan keadaan dalam negeri sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang di menangkan oleh U Nu dan partainya. Union Party. Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah sipil dengan memberikan waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintahan sipil tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar yang semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata system perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan dikalangan pro militer dan militer. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 1962, militer melakukan kudeta dibawah pimpinan Jenderal Ne Win.

Keberhasilan kudeta atas perdana menteri U Nu pada tahun 1962 itu bisa dikatakan sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik, yaitu Burma Socialist Program Party (BSPP) yang dibentuknya sendiri dan semula bernama dewan revolusioner. BSPP atau yang biasa dikenal dengan partai Lenzin atau Lanzin Party ini bisa dikatakan sebagai partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggotaberasal dari golongan militer. Sejak berdiri pada tahun 1962 dan disahkan pada tahun 1964 keanggotaan partai ini didominasi oleh

Partai Sosialis Burma melakukan pula nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan asing dan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah isolasi dari dunia luar, terutama dari Negara-negara Barat dan menerapkan system ekonomi yang tersentralisir. Kondisi tersebut lalu menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian Burma sehingga banyak memunculkan perdagangan gelap dan akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan program industrialisasi dalam kerangka Negara sosialis dan juga program revolusi hijau sebagai tanggapan dari eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Burma sebagai penunjang perbaikan perekonomian Burma.³³

Sebagai Negara yang dikuasai rezim militer, semakin besar pergerakan yang mendukung demokrasi, semakin besar pula usaha untuk pemerintah militer Myanmar dalam membendunginya, contohnya adalah penolakan militer terhadap hasil pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Daw Aung San Suu kyi bersama partainya *National League for Democratic* (NLD). Berkuasanya kembali pemerintah militer pada tahun 1990 merupakan kelanjutan dari pemerintahan militer sebelumnya yang telah berkuasa sejak tahun 1962.³⁴

B. KONDISI POLITIK MYANMAR

Pada tahun 1987. Jenderal Ne Win mengalami kegagalan manajerial yang menyebabkan kemunduran perekonomian Myanmar dikarenakan perencanaan pertumbuhan ekonomi Myanmar menekan pada industrialisasi atas biaya dari pengembangan sector pertanian karena efisiensi anggaran pada sector public, serta

³³ Dr. Sar Desai, *Southeast Asia Past and Present*, 4th Edition, (Ciang Mai: Silkwm Books, 1997) Hal 240.

³⁴ *Journal of Indonesian Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2, Januari

adanya korupsi pada jajaran pemerintah dan pemberontakan pada rakyat sipil, pemberontakan atau Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa mendapat dukungan dari kelompok pro demokrasi yang tergabung dalam The National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi.³⁵

Akibat pemberontakan tersebut, akhirnya Jenderal Ne Win mundur dari kepemimpinan partai Sosialis Burma dan juga dari keanggotaan partainya. Lalu posisinya digantikan oleh Jenderal Sein Lwin yang justru melakukan tindak kekerasan pada demonstran.³⁶

Tidak lama kemudian setelah peristiwa kekerasan tersebut, pada tanggal 12 Agustus 1988, Jenderal Sein Lwin memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh mantan Jenderal Maung-Maung, yang kemudian menjabat sebagai presiden Burma, dan merencanakan untuk menyelenggarakan pemilu Myanmar, namun tetap berada dibawah pengawasan pihak militer. Namun hal tersebut ditolak keras oleh kelompok oposisi, yang justru menginginkan agar Jenderal Maung-Maung mengundurkan diri dan digantikan oleh pemerintahan sementara yang berasal dari kaum sipil sampai pemilu diadakan. Akhirnya pada tanggal 18 September 1988.

³⁵ Anais Tamen, Op cit.

³⁶ Damien Kingsbury, John McKay, Janet Hunt, Mark McGillivray, and Matthew Clarke. "Environment and Development." In *International Development: Issues and Challenges*, hal 278-279. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2008. Dikutip dari <http://www.amazon.com/International-Development-Challenges-Damien->

Jenderal Dr. Maung-Maung mengakhiri pemerintahannya dan pemerintahan diambil alih oleh Jenderal Saw Maung.³⁷

Ketika Myanmar berada dibawah pemerintahan militer pimpinan Jenderal Saw Maung yang mengambil alih kekuasaan pada tanggal 18 September 1988, watak otoriterisme pendahulunya diwarisi oleh pemerintahan ini. Kudeta tahun 1988 ini dalam kenyataannya tidak dapat diartikan sebagai adanya pergantian kekuasaan di Myanmar. Hal ini semata-mata pergantian pemerintahan militer yang “lama” menjadi pemerintahan yang “baru”, dari BSPP menjadi The State Law and Order Restoration Council (SLORC). Pada dasarnya kekuasaan pemerintahan tetap berada ditangan militer sebagaimana pendahulunya, pemerintahan militer militer Jenderal Saw Maung juga memimpin Negara dengan otoriter. Telah banyak bukti yang menunjukkan hal itu, misalnya penolakan SLORC terhadap hasil pemilu pada tanggal 27 Mei 1990. Seperti diketahui pada pemilu tersebut partai NLD berhasil merebut 392 kursi dari 485 kursi di parlemen nasional. Hasilnya tersebut sesungguhnya diluar prediksi militer, sebelumnya SLORC merasa yakin bahwa partai pemerintah, National Unity Party (NUP), akan memenangkan pemilu tersebut. Disinilah sifat otoriter muncul, karena berbagai protes rakyat dihadapi dengan tindakan represif oleh militer. Di penghujung tahun 1994, SLORC ini semakin melemahkan posisi sipil dalam kancah perpolitikan di Myanmar.

Pada pemerintahan Than Shwe, militer sangat kuat mengendalikan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi rakyat Myanmar.³⁸ Meskipun SLORC diganti menjadi The

menjalankan fungsi-fungsi lembaga sebelumnya yaitu mengontrol kehidupan social politik rakyat Myanmar.³⁹ Myanmar kemudian mengalami peralihan rezim pada tanggal 29 Agustus 2003. dari Jenderal Than Shwe menjadi Jenderal Khin Nyunt yang dikenal moderat memimpin pemerintahan. Akan tetapi, tampilnya mantan ketua badan intelijen militer Khin Nyunt sebagai perdana menteri baru hanyalah upaya Jenderal Than Shwe (mantan perdana menteri) untuk “mempermalukan” kekuatan Khin Nyunt. Karena sebagai ketua badan intelijen. Khin Nyunt dikenal memiliki dukungan pihak militer. Dengan berhentinya Khin Nyunt dari posisi itu membuatnya dijuluki “Jenderal tanpa pasukan”, meskipun Khin Nyunt telah menjadi Perdana Menteri. Namun sebagai Perdana Menteri, ia kini harus berurusan dengan dunia internasional dalam menangani masalah penahanan Aung San Suu Kyi.⁴⁰

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Jenderal Khin Nyunt diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri untuk bertanggung jawab atas kasus korupsi. Selain itu, ia diberhentikan karena telah mengeluarkan sejumlah perintah yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan Undang-Undang, setelah peristiwa itu Khin Nyunt dikenakan tahanan rumah.⁴¹ Setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2004, Letnan Jenderal Soe Win menggantikan Jenderal Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri dan beliau diminta untuk mempercepat pelaksanaan demokratisasi di Myanmar.⁴²

³⁹ Ibid. Hal 132

⁴⁰ Half the sky dikutip dari <http://fitriasofyani.blogspot.com/2012/01/aung-san-suu-kyi-endless-battle.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2013

⁴¹ *Konflik politik Myanmar dahulu hingga kini* dikutip dari

Pada tahun 2005 sampai dengan 2007, belum terjadi perubahan kekuasaan di Myanmar, yang pada faktanya segala keputusan ada di Negara tersebut sebenarnya tetap di pegang kendali oleh Jenderal Senior Than Swe.⁴³ Namun pada tahun 2007, telah dikabarkan bahwa Jenderal Senior Than Swe yang berusia 73 tahun, sedang memiliki masalah kesehatan dan membuatnya untuk pergi ke Singapura selama dua minggu untuk memeriksa kesehatannya, selain itu, Perdana Menteri Soe Win yang menjadi orang kepercayaan Jenderal Senior Than Swe, dikabarkan pula tengah dirawat di rumah sakit Singapura. Junta mengatakan, Soe Win , yang diperkirakan berusia 58 tahun tersebut sehat, tetapi keterangan itu tidak mampu meredam spekulasi tentang siapa pengganti Jenderal Senior Than Swe, yang telah memerintah sejak tahun 1992.⁴⁴

Ketidakpastian yang terjadi tentang keadaan para pemimpin Junta tersebut membuat rakyat Myanmar dan dunia Internasional khawatir tentang siapa yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan dari salah satu pemimpin Junta tersebut, karena jika kedua pemimpin tersebut meninggal, maka demokrasi yang dijanjikan selama ini oleh kedua tokoh tersebut menjadi tidak jelas, dan kepastian tentang pembebasan pemimpin NLD pun menjadi tidak pasti kapan waktunya.

⁴³ AI Laporan Tahunan 2007- Gambaran Umum Negara-Negara Asia Tenggara Dan Australia Tahun 2006, "Myanmar/Uni Myanmar", mengutip dari http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nst/pages/BAHAIR2007_SEAsia. diakses pada tanggal 29 Januari 2013

⁴⁴ Redaksi Kompas, (28 Maret 2007), "Junta Militer Unjuk Kekuatan", mengutip dari <http://www.kompas.com>. diakses pada tanggal 29 Januari 2013

C. SANKSI UNI EROPA TERHADAP MYANMAR

Myanmar adalah sebuah negara yang memiliki sejarah konflik domestik yang kompleks dan berlarut-larut (seperti yang dituturkan diatas). Masalah-masalah domestik yang telah terjadi di Myanmar antara lain ialah :⁴⁵

- Terhambatnya transfer kekuasaan dari militer kepada pemimpin yang dipilih rakyat.
- Konflik etnis dan separatisme.
- Masalah kelemahan konstitusi karena adanya keracunan definisi batas dan bentuk Negara sehingga memperparah konflik separatism.
- Masalah ketinggalan ekonomi dan pembangunan.
- Masalah sistem sosial dan pendidikan, termasuk masalah perlindungan HAM dan demokrasi.
- Masalah produksi opium dan peredaran narkotika terutama didaerah perbatasan.

Keenam masalah tersebut secara keseluruhan tidak hanya berimplikasi pada ketidakstabilan politik secara nasional saja, namun juga memiliki dimensi internasional, Dilihat dalam konteks hubungan internasional yang lebih luas, Myanmar merupakan Negara terbesar di perbatasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur, adanya

⁴⁵ Joseph Silverstein, "Myanmar's (Burma's) Six Domestic Challenges in the 1900s", diedit oleh Rohana

suatu masalah yang terjadi di Myanmar kemudian tidak hanya menjadi suatu masalah domestic nasional saja, karena dapat menjadi suatu masalah yang penting dalam hubungan internasional.⁴⁶ Seperti halnya yang terjadi pada Myanmar ialah adanya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pada masyarakat sipil.

Ketika berakhirnya perang dengan kemenangan pada Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Mengangkat isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan good governance sebagai salah satu prioritas utama dalam hubungan internasional. Perubahan global pun terjadi dengan ditandai oleh perubahan norma secara global dengan HAM sebagai prioritas utama, meningkatnya interdependensi antara Negara dan semakin kuatnya jaringan masyarakat sipil dalam melintas batas Negara.⁴⁷

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar telah memunculkan perbedaan pandangan dan sikap bagi setiap pihak yang melihatnya, baik itu Negara ataupun organisasi regional bahkan internasional, mengenai cara-cara penyelesaian maupun implikasi dan kasus tersebut terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian. Isu ini semakin menjadi hal yang krusial dalam hubungan internasional kontemporer. Setelah berakhirnya perang dingin, berakhir pula persaingan ideology blok barat dan blok timur, dan saat itulah HAM menjadi sorotan atau fokus internasional. Kendati tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum militer telah lama terjadi di Myanmar, namun

⁴⁶ Joseph Silverstein, Op Cit. hal 22.

⁴⁷ Herman Kraft, "The Principle of non-Intervention: Evolution and Challenge for The Asia-Pacific Region", diadit oleh David Dickens dan Guy Wilsom Roberts, dalam *non-intervention and State*

fenomena pembatalan pemilu 1990 di Myanmar dengan segera menjadi isu demokratisasi di Myanmar serta pelanggaran HAM terhadap tokoh-tokoh demokrasi terutama Suu Kyi, termasuk juga tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas sebagai isu internasional.

Usaha pemerintahan Junta Militer Myanmar untuk menekan kelompok oposisi-pro demokrasi serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, mengundang reaksi yang tidak kalah keras dari dunia internasional, salah satunya Uni Eropa, sejumlah Negara sudah mulai membicarakan pemberlakuan sanksi terhadap Negara Myanmar, bahkan Uni Eropa memberikan sanksi serta tekanan terhadap junta Myanmar, sejak tahun 1991 Burma / Myanmar telah menjadi perhatian Uni Eropa,⁴⁸

Uni Eropa membuat posisinya terhadap pejabat rezim militer pada tahun 1996, ketika mengadopsi Posisi umum di Burma / Myanmar. Sedangkan Amerika Serikat mengambil posisi yang jelas terhadap junta dari 1989. Uni Eropa tidak melakukan beberapa tindakan tingkat supranasional sebelum tahun 1996. Pada akhir 1980-an, negara-negara anggota secara individual telah menanggukhan bantuan non-kemanusiaan, terlebih lagi karena peristiwa dramatis yang telah mereka saksikan, dan pada awal 1990-an,

Pada tahun 1996 Uni Eropa mengambil tindakan terhadap Burma / Myanmar, melihat banyaknya terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, dan juga mengenai demokrasi yang tidak berjalan semestinya dengan

adanya penahanan Aung San Suu Kyi, sejauh ini, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada Junta Militer Myanmar, yakni sanksi militer dan sanksi ekonomi,

Adapun sanksi Uni Eropa terhadap rezim militer Myanmar adalah :

1. Sanksi ekonomi

Memberlakukan Larangan visa, anggota senior militer dan pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa kecuali mereka adalah bagian dari pertemuan multilateral seperti PBB atau pertemuan ASEM.⁴⁹

Ada juga sanksi ekonomi terhadap rezim militer Myanmar yaitu aset keuangan milik anggota rezim militer yang berada dalam rekening bank di Uni Eropa dibekukan, dan larangan investasi terhadap BUMN Burma/Myanmar ataupun perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh anggota rezim militer, dan larangan perdagangan, serta embargo senjata sejak tahun 1990, dan sejak tahun 2007 ada larangan perdagangan permata, pertambangan dan kayu karena merupakan sumber perekonomian rezim militer Myanmar.⁵⁰

Pada tahun 1996 semua program pembangunan non-kemanusiaan dihentikan. Bantuan kemanusiaan selalu diperbolehkan di bawah pengawasan Dewan umum, dan pada tahun 2004 keputusan Dewan Umum direvisi dan sejak itu ada juga pembebasan dari larangan bantuan pembangunan, asalkan program tersebut merupakan program-program pembangunan yang berkontribusi terhadap realisasi hak asasi manusia,

⁴⁹ Anais Tamen THE EUROPEAN UNION'S SANCTIONS RELATED TO HUMAN RIGHTS: The

demokrasi yang baik, pemerintahan, pencegahan konflik dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat sipil. Program pembangunan antara lain dilakukan di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan atau perlindungan lingkungan.⁵¹

2. Sanksi Militer

Terhadap Junta Militer Myanmar Komunitas telah mengambil tindakan dengan melakukan embargo senjata terhadap rezim militer Myanmar (1990) dan penangguhan kerja sama pertahanan (1991). Langkah-langkah tersebut mencakup di dalam Dewan Umum pada tahun 1996.⁵²

Pada dasarnya, ada dua tujuan utama dari tindakan Uni Eropa terhadap Burma/Myanmar: yang pertama dan paling penting adalah untuk mempromosikan transisi demokrasi dan yang kedua dan yang terbaru adalah untuk membantu penduduk Burma mengatasi kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak.⁵³

Kedua tujuan itu tercermin dalam dua pendekatan yang saling melengkapi: penerapan sanksi yang ditargetkan dan bantuan kemanusiaan. Asumsi utama yang mendasari dari sanksi Uni Eropa adalah bahwa demokratisasi tidak hanya tujuan itu sendiri, tetapi merupakan prasyarat untuk pembangunan, perdamaian dan stabilitas di Burma/Myanmar. Tujuan dari sanksi adalah untuk melemahkan rezim, untuk meredakan represi terhadap penduduk, untuk mendorong rezim agar bisa berdialog tripartite dengan kekuatan etnis dan kekuatan demokrasi terutama dengan Aung San Suu Kyi Pada saat yang sama, bagaimanapun, Uni Eropa juga berusaha untuk

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Burma Centrum Nederland (BCN), EU Sanction, dikutip dari <http://www.burmacentrum.nl/bcn-in->

meminimalkan efek negatif dari sanksi terhadap populasi yang lebih luas. Dan inilah mengapa Uni Eropa sanksi terhadap Burma / Myanmar belum meluas seperti sanksi AS tetapi sudah ditargetkan, yang berarti bahwa mereka ditujukan pada anggota individu dari rezim militer dan pada industri yang penting bagi perekonomian rezim dan keberlangsungan hidup politik.⁵⁴

Sanksi Uni Eropa terhadap Burma / Myanmar telah diabadikan oleh Dewan Umum dan berlaku bagi semua Negara anggota Uni Eropa, pertama kali sanksi ini dikeluarkan pada tahun 1996 dan telah diperkuat beberapa kali sejak saat itu, yang mana Dewan Umum yang telah mengusulkan pertemuan tingkat tinggi antar tiap Negara anggota Uni Eropa dan menyatakan bahwa sanksi terhadap Myanmar tersebut telah dibenarkan. Dan ini juga berarti bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar hampir pasti tidak akan berubah, kecuali situasi politik di Burma/Myanmar telah menunjukkan perubahan signifikan menjadi kearah lebih baik.

Pada dasarnya Uni Eropa mengeluarkan kebijakannya demi perbaikan terhadap sistem pemerintahan Junta Militer Myanmar kearah demokrasi yang lebih baik dengan memperhatikan kepentingan sipil, mengingat isu internasional terkini yang mengacu kepada isu HAM, dan dengan adanya sanksi yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa dan pihak lainnya terhadap Junta Militer Myanmar, diharapkan pemerintah Junta Militer Myanmar melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakannya yang